

MANUSKRIP ACEH: REVITALISASI KEARIFAN MASYARAKAT ACEH DI ERA GLOBAL

Hermansyah

Pendahuluan

Tahun 2004 menjadi titik balik Aceh berbenah dan bangkit dari keterpurukan. Pasca bencana alam (gempa-tsunami) dan bencana kemanusiaan (konflik) menuntun adanya proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Indonesia dan pihak asing (luar negeri) dalam berbagai bidang turut menumbuhkan perekonomian dan sosial masyarakat Aceh dengan pesat. Proses itu tidak hanya fokus di infrastruktur, akan tetapi juga di bidang sosial keagamaan dan cagar budaya, serta mempengaruhi pola pikir dan cara pandang generasi sekarang.

Sebagai daerah kaya potensi alam dan mewariskan nilai sejarah dan budaya masa lampau, Aceh bergulir dalam beragam cuaca politik dan kebijakan, mulai dari periode kesultanan, kolonial, hingga kemerdekaan Indonesia. Pergolakan dan peperangan panjang juga menghiasi tiga periode tersebut di Aceh, baik pertikaian internal, perang saudara, maupun konflik vertikal dan horizontal. Akibatnya, cagar budaya dan kearifan masyarakat terkubur oleh bencana kemanusiaan tersebut, terlebih “kekayaan alam dan kearifan” musnah saat bencana alam terbesar terjadi di abad ke-21.

Dampak dari bencana alam dan kemanusiaan di Aceh hampir pada seluruh aspek, fisik dan non-fisik, “infrastruktur keras” ataupun “lunak” yang melumpuhkan sistem edukasi, pengetahuan/informasi masyarakat, sosial keagamaan, ekonomi, politik dan lainnya. Kedua bencana tersebut tidak hanya menghancurkan fisik gedung, akan tetapi juga sistem di masyarakat (infrastruktur lunak), seperti hancurnya gedung Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) beserta data, manuskrip, dan dokumen-dokumen lainnya di dalam gedung, belum lagi di koleksi pribadi masyarakat yang sama sekali belum terdata. Putusnya informasi dan warisan sebelumnya merupakan bencana bagi generasi selanjutnya terhadap nilai sejarah dan kearifan masyarakat sebelumnya.

Sebagai warisan leluhur, manuskrip merupakan salah satu peninggalan yang banyak di Aceh dan dapat diperoleh di beragam kolektor saat ini. Naskah Kuno atau Manuskrip adalah dokumen dalam bentuk apapun yang ditulis dengan tangan atau diketik yang belum dicetak atau dijadikan buku tercetak yang berumur 50 tahun lebih (UU Cagar Budaya No. 5 Tahun 1992, Bab I Pasal 2). Dengan aturan tersebut,

tidak sulit bagi Aceh untuk menentukan naskah kuno sebagai dokumen berharga. Faktanya, disebabkan minimnya sosialisasi yang dilakukan membuat masyarakat kurang mengerti status tersebut, khususnya di pedalaman Aceh. Perihal tersebut membuat banyak naskah di Aceh terpendam dalam gudang, sudut *meunasah* (balai), pondok dayah (pesantren), dan beragam tempat yang kurang layak untuk penyimpanan naskah.

Setidaknya ada dua tipe para kolektor masyarakat, pertama; masyarakat mengoleksi naskah sebagai warisan keluarga sebelumnya. Kelompok pertama ini masih kuat memegang tradisi leluhur, petuah dan wasiat sebelumnya, sehingga naskah mendapat tempat mulia dan tidak dapat disentuh sembarangan, mereka juga mempercayai dengan menjaga warisan tersebut akan dijauhkan dari malapetaka dan bahaya alam. Tipe kedua para kolektor naskah yang menjadikan manuskrip sebagai "barang antik" untuk bisnis (perdagangan). Tradisi ini sudah berjalan sejak lama pada periode kolonial, dimana orang asing membayar upah menulis atau membelinya langsung dari masyarakat. Sedangkan pada saat ini, sebagian besar manuskrip dibeli oleh orang Malaysia dengan harga tinggi untuk disimpan di negaranya.

Jika disadari warisan budaya tersebut merupakan kearifan masyarakat tempo dulu yang menunjukkan kekayaan khazanah bangsa, maka patut diwariskan untuk masa depan. Manuskrip merupakan salah satu warisan paling banyak di Aceh. Hal serupa juga terjadi di wilayah-wilayah sentra pengembangan Islam di Nusantara, jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk peninggalan budaya material non-tulisan di Indonesia, seperti candi, istana, masjid, dan lain-lain, jumlah peninggalan budaya dalam bentuk naskah jelas jauh lebih besar (Ikram 1997: 24). Dengan kekayaan informasi dan ilmu yang terpendam, naskah juga menyimpan makna dan dimensi yang sangat luas karena merupakan produk dari sebuah tradisi panjang yang melibatkan berbagai sikap budaya masyarakat dalam periode tertentu (Baried 1994: 2).

Apabila dijumlahkan seluruh naskah aksara Jawi berbahasa Aceh, Arab dan Melayu di seluruh skriptorium (koleksi) naskah, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, maka tidak kurang dari ribuan teks naskah otoritatif (original) dan salinannya. Teks naskah otoritatif mungkin sangat sulit ditemukan pada karya kitab-kitab naskah kuno di Aceh, mayoritas yang ditemukan sekarang adalah salinannya, kecuali surat-surat berharga dan sarakata yang masih tersimpan baik dan rapi di museum dan para kolektor. Namun, terlepas dari itu semua, warisan yang sampai sekarang patut diapresiasi masa mendatang bukan untuk diabaikan dan dimusnahkan dengan regulasi-regulasi yang tidak mendukung terhadap pelestarian warisan akibat kepentingan politik ataupun era globalisasi, seperti peleburan Museum Aceh ke dalam subbidang Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar), atau "alih fungsi" gedung Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh menjadi Rumah Sakit Gigi dan Mulut merupakan langkah yang tidak mendukung dalam pelestarian warisan budaya dan menghilangkan nilai sejarah gedung itu sendiri beserta isi dan fungsinya.

Preservasi Naskah di Aceh

Di era orde baru dan awal reformasi, perhatian terhadap pelestarian naskah belum memadai dikarenakan beberapa faktor, antaranya situasi politik Aceh dengan konflik vertikal berkepanjangan, ternyata banyak mempengaruhi ke sektor lain, termasuk pendidikan, budaya dan penelitian keilmuan. Faktor lainnya yang mempengaruhi lemahnya regulasi pemerintah terhadap pelestarian warisan tulis adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) di Aceh. Akibatnya, pengetahuan seputar ilmu filologi dan pernaskahan (manuskrip) tidak diketahui oleh banyak orang, termasuk pelajar dan para pewaris manuskrip itu sendiri.

Sebenarnya, program kegiatan pemeliharaan (*preservation*) sudah dikenal sejak dahulu, dan pasca gempa-Tsunami 2004 terus tumbuh berkembang dalam dunia pernaskahan Aceh, preservasi masa mendatang dapat meliputi; Inventarisasi naskah, Katalogisasi, Restorasi naskah, Digitalisasi naskah, Database (pangkalan data), dan Tipologi kajian (analisis) teks, naskah serta kajian kontekstual. Sebahagiannya sudah dilakukan secara berkelanjutan, walaupun belum ada prioritas kebijakan terhadap program-program tersebut, sehingga belum ada sinerginitas antara satu lembaga dengan lainnya. Secara periodik, perhatian terhadap preservasi naskah di masyarakat dapat dipilah menjadi dua bagian sesuai dengan situasi dan kondisi Aceh, yaitu pra dan pasca bencana alam dan bencana kemanusiaan. Hal itu untuk memudahkan melihat regulasi pemerintah dan perhatian masyarakat terhadap kearifan dan pengetahuan untuk merevitalisasi pengetahuan budaya dan kultur masa lalu dengan konteks sekarang dengan jumlah ribuan naskah di Aceh.

Akumulasi angka tersebut tentu akan mencapai jumlahnya jika dirunut sebelum tragedi gempa dan tsunami Aceh-Nias pada 26 Desember 2004 atau sesudahnya. Hingga sebelum tragedi bencana dunia tersebut, Aceh memiliki beberapa lembaga yang mengoleksi naskah-naskah Jawi (Bahasa Aceh dan Melayu) dan Arab, seperti di Museum Negeri Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA), Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Yayasan Pendidikan dan Museum Ali Hasjmy (YPAH) berlokasi di Banda Aceh. Zawiyah Tanoh Abee di Seulimuem, Aceh Besar, dan Dayah Awee Geutah, Bireuen.

Selain di Aceh, naskah-naskah kuno juga tersimpan di luar Aceh, koleksi terbanyak di Perpustakaan Nasional RI (PNRI) Jakarta. Menurut T.E Behrend (1998) dalam katalognya, jumlah naskah koleksi PNRI mencapai 9870 naskah berbagai bahasa pada tahun 1996, dan yang dimikrofilmkan sekitar 4621 teks naskah, atau sekitar 773.565 halaman, yang menghabiskan 859 rol microfilm. Dari jumlah tersebut, naskah berbahasa Aceh yang terdata di PNRI sekitar 73 naskah dalam subkoleksi *Verschillende Talen* (VT) dan puluhan dalam subkoleksi lain, dan 594 naskah Jawi dalam koleksi Melayu (ML). Jumlah tersebut tidak termasuk naskah yang diperoleh PNRI pasca gempa-Tsunami 2004 dari masyarakat Aceh. Mengenai jumlah naskah Melayu, Ismail Husein (1974) pernah mengemukakan angka 5.000, Chambert-Loir (1980) menyebut 4.000, dan Russel Jones sampai pada angka 10.000 (Mulyadi, 1994).

Sedangkan di luar negeri, naskah Aceh dan Jawi tersimpan rapi di hampir

seluruh Negara. Dan, Belanda, Malaysia dan Inggris menjadi tempat paling banyak dan lengkap yang menyimpan manuskrip Aceh-Melayu. Di Malaysia, terdapat di beberapa tempat, (Perpustakaan Negara Malaysia (PNM), Dewan Bahasa dan Pustaka), Belanda (Amsterdam, Arnhem, Leiden Library University, Universiteitsbibliotheek, Rotterdam, Utrecht, Den Haag), Belgia (Antwerpen), Inggris (British University, Manchester). Kemudian, menyusul negara Brunai Darussalam, Australia, Amerikat Serikat, Perancis, India, Afrika Selatan, Austria, Belgia, Ceko-Slovakia, Denmark, Hongaria, Irlandia, Italia, Jerman, Mesir, Norwegia, Polandia, Rusia, Singapura, Spanyol, Srilangka, Swiss, Turki, dan Thailand. (Chambert-Loir, 1999)

Di Aceh, tahun 2004 menjadi bencana besar bagi dunia pernaknahan Aceh dan Melayu, karena beberapa gedung lembaga yang menyimpan naskah hancur akibat terjangan tsunami dan goyangan gempa. Di antaranya adalah gedung PDIA dan Balai Perpustakaan Daerah Aceh (BPDA), seluruh koleksi dua lembaga tersebut hilang dan hancur. Di PDIA misalnya, ada sekitar 82 naskah yang hanyut dibawa tsunami, dan tidak diperoleh satupun fisik naskah, padahal beberapa judul naskah langka dan sangat sulit diperoleh variannya, seperti *Kasyf an-Nuqab 'an Nuzhat at-Thullab* karya Abdurrauf al-Fansuri, *Salasilah Tok Abdul Jabar bin Tok Usman* ditulis oleh Usman bin Dato' Abdul Hamid, *Kurrasat an-Nur* Tgk Haji Ahmad Nurdin Hanafi, dan *Hikayat Asai Padee* (Hikayat Asal Padi).

Namun sebaliknya, kesadaran kembali ke pada warisan leluhur dan melestarikannya muncul pasca bencana tersebut. Di antaranya preservasi, inventarisasi, katalogisasi, dan digitalisasi. Inventarisasi tersebut biasanya menghasilkan daftar koleksi naskah atau katalog, beberapa usaha katalogisasi sudah ditempuh di Nusantara (Melayu-Indonesia) sejak pertengahan abad ke-20, di antara yang terpenting dapat disebut Hooyka dkk. 1950, Chambert-Loir 1980 (Katalog Naskah Melayu), van der Molen 1984 (Katalog Naskah Jawa), Ibrahim bin Ismail 1986 (Katalog Naskah Asia Tenggara), Tol 1993 (Katalog Naskah Islam). Nicholas Heer juga telah mencantumkan daftar katalog berbahasa Melayu "A List Of Malay Manuscript Catalogues", sedikitnya terdapat 41 katalog Naskah Jawi yang dapat dimanfaatkan. Katalog saban hari semakin lengkap dan sistematis. Beberapa di antaranya sangat bagus dan terperinci yang dapat memberikan informasi kepada peneliti dan pelajar, seperti Siri Bibliografi Manuskrip (PNM, Kuala Lumpur), dan T.E Behrend Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara (Jakarta). Lima katalog telah terbit dalam seri yang kedua (1990 & 1998, 1994, 1997, dan 1999).

Pasca 2004, geliat inventarisasi naskah di Aceh semakin berkembang, termasuk di dalamnya penyusunan katalog buku dan online, sehingga jumlah naskah mencapai 4000 buah naskah. Tumbuhnya kesadaran tersebut juga dialami di kalangan masyarakat Aceh dalam melestarikan warisannya, sebagaimana disinggung di atas terhadap tipe para kolektor di masyarakat yang mulai beralih fungsi. Beberapa lembaga penyimpan manuskrip Aceh terdiri dari lembaga pemerintahan, swasta dan koleksi personal, yaitu;

1. Museum Negeri Aceh (MNA) yang didirikan pada tahun 1915, dan diresmikan

sebagai MNA pada tanggal 1 September 1980. Identifikasi pertama kali dilakukan pada tahun 1982. Kegiatan tersebut menghasilkan identifikasi teks sebanyak 51 judul. Tahun 1983 sebanyak 150 naskah, kemudian katalog *Identifikasi* 1985, 1987, 1988, 1989, 1992 (6 katalog Identifikasi) mendaftarkan 362 judul teks naskah. Memasuki awal abad ke-21 hingga gempa-tsunami (2004), koleksi MNA bertambah menjadi 1200 naskah. Dan, selanjutnya pasca bencana tersebut, MNA menambah koleksinya, termasuk naskah hibah dari BRR, sehingga berjumlah \pm 1800 naskah. Naskah tersebut terus bertambah jumlahnya seiring dengan program preservasi dan pembelian di masyarakat hingga tahun 2014.

2. Zawiyah Tanoh Abee terletak di Seulimum Aceh Besar, sebagai salah satu pusat scriptorium dan museum manuskrip sejak abad ke-17 M hingga saat ini. Perkembangan dan peranan zawiyah ini diketahui dari silsilah tarekat Syattariyah yang berbeda afiliasi dengan Abdurrauf al-Fansuri (w. 1693) di Banda Aceh. Peranannya tersebut tidak hanya menjadi pengoleksi naskah, tetapi juga terlibat dalam penulisan, penyalinan, pembukuan dan restorasi naskah secara turun-temurun, dan menggapai puncaknya sejak masa Syekh 'Abd Al-Rahim kakek dari Syekh Abd al-Wahab (Tgk Tanoh Abee, w. 1894) hingga Tgk Abu M. Dahlan Al-Fairusy al-Baghdady (Abu Taboh Abee, 1943-2006).

Koleksi naskah Tanoh Abee menurut Wan Ali (1993) sekitar 6.000 naskah, terdiri dari 900 naskah berbahasa Melayu, dan selebihnya berbahasa Arab.

Penyusunan katalog naskah Tanoh Abee sudah ditempuh beberapa kali, Wamad Abdullah & Tgk. Abu M. Dahlan al-Fairusy (1980) telah menyusun Katalog Naskah Tanoh Abee sebanyak 400 naskah. Dalam kata pengantarnya, pustaka ini masih menyimpan lebih dari 900 buah manuskrip, edisi pertama berjumlah 400 naskah, dan selebihnya disebut dalam katalog yang diperikan oleh Zunaimar & M. Dahlan al-Fairusy (1993).

Terbaru, Katalog Naskah Dayah Tanoh Abee diluncurkan pada Juli 2010, dalam rangka rekonstruksi budaya Aceh pasca gempa dan tsunami tahun 2004, tergabung dalam tim yang disponsori oleh The Centre for Documentation & Area-Transcultural Studies (C-DATS) Tokyo University of Foreign Studies (TUFS), Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa), Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh, dan Dayah Tanoh Abee sendiri, penelitian lapangan dan pengumpulan data telah berjalan sejak tahun 2006. Adapun jumlah naskah yang berhasil diperikan dalam katalog terbitan C-DATS Tokyo, sebanyak 280 bundel naskah yang terdiri dari 367 teks. Jumlah naskah dalam katalog ini lebih sedikit dari susunan katalog sebelumnya, walaupun memiliki kelebihan dalam mendeskripsi naskah. Namun demikian, setiap katalog memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing.

3. Museum Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy (YPAH) didirikan oleh Prof. Dr.

Ali Hasjmy pada tanggal 15 Januari 1991, seorang intelektual Aceh, yang juga budayawan, negarawan, dan cedekiawan terkemuka pada masanya. Mantan Gubernur Aceh (1957-1974) telah menghasilkan sekitar 57 karya tulis dalam berbagai bidang (sejarah, sastra, agama, politik dan hukum). YPAH mengoleksi dokumen-dokumen penting dan barang berharga, di antara koleksi YPAH yang sangat berharga adalah naskah kuno (manuskrip).

Pada tahun 1992-1995, pengurus YPAH pernah melakukan inventarisasi pada sebagian koleksinya, namun penerbitan katalog hanya terbatas pada lingkungan internal, dan belum dipublikasikan secara meluas. Seiring dengan perkembangan peranan YPAH dalam mengumpulkan naskah-naskah kuno dari masyarakat, sehingga sebagian naskah belum tercantum. Usaha katalog berikutnya dilakukan pada tahun 2005-2007 atas kerjasama beberapa lembaga YPAH, PPIM, Manassa, TUFS, C-DATS dan PKPM. Dari hasil kegiatan tersebut diperoleh data YPAH menyimpan 232 bundel naskah dengan 314 teks (Oman & Munawir: 2007)

4. Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) berdiri pada tahun 1976 dan diresmikan dua tahun kemudian, lembaga ini hasil kerjasama Pemda Aceh dengan Universitas Syiah Kuala dan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV/ The Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies) yang ikut memberi sumbangan copyan buku-buku koleksi Belanda periode Kolonial, selain itu terdapat beberapa koleksi buku dan manuskrip dari internal PDIA sendiri.

Koleksi PDIA tahun 1988 tercatat ada 66 naskah agama dan 23 hikayat. Dan Ali menyertakan 70 naskah berbahasa Melayu, Aceh dan Arab (Ali: 1993).

Hingga 2004, seluruh koleksi di PDIA musnah akibat gempa-Tsunami, menurut Rusdi Sufi (red. Pimpinan PDIA) lebih dari ratusan manuskrip, arsip penting Belanda dan surat-surat bersejarah hilang. Namun dari list data yang diperoleh ada 82 naskah yang hancur.

Pasca bencana, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias membangun kembali gedung PDIA di lahan yang sama. Kini, beberapa dokumen dan file-file penting diperoleh dari sumbangan Sticing Peutjut Fond, Belanda, File dokumen dari KITLV, restorasi dokumen akibat tsunami kerjasama dengan Jepang.

5. Koleksi Pribadi

1. Tarmizi A Hamid, Banda Aceh; mulai mengoleksi naskah sejak tahun 1996. Menurutnya, jumlah koleksinya sampai saat ini mencapai sekitar 482 teks naskah. Jumlah tersebut menunjukkan paling banyak koleksi pribadi dari beberapa kolektor lainnya. Namun, seluruh koleksinya belum dikatalogkan dan diinventarisir. Dan sejauh ini hanya pada tahap restorasi naskah sebanyak 102 naskah selama dua tahap (2010 dan 2011) yang dilakukan oleh PKPM bekerjasama dengan Pemda Aceh.
2. Harun Geuchik Leumik, Banda Aceh; sebagai pengoleksi benda kuno,

ia juga mengoleksi manuskrip sebanyak 26 buah dan telah direstorasi, sebagian besar mushaf Al-Qur'an. Akan tetapi, semua koleksinya belum diinventarisir dan belum disusun katalognya.

3. Samsul Anwar, Banda Aceh; Ia mengoleksi naskah sebanyak 180 naskah. Di antaranya hanya 63 naskah yang direstorasi, dan 20 di antaranya digitalisasikan. Seluruh kegiatan tersebut juga dilaksanakan oleh PKPM.
4. Syahrial bin Zainun Idris (Alm) Aceh Besar; Selain keluarga Tanoh Abee yang memiliki koleksi terbanyak di wilayah Aceh Besar. Keluarga Syahrial bin Zainun Idris juga mengoleksi banyak naskah, Zainun Idris (w. 2007) telah mengoleksi 51 naskah. Setelah ia wafat, ia mewariskan kepada anaknya Syahrial, selain koleksinya yang diperoleh dari masyarakat sebanyak 180 naskah. Sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 231 naskah, ia menginventarisir secara pribadi dan belum dikatalog dan direstorasi.
5. Tgk Adnan Hasyim, Lambirah, Aceh Besar; Memiliki 20 naskah yang telah direstorasi dan digitalisasi oleh PKPM.
6. Hasballah Teupin Raya, Pidie; Ia banyak mengoleksi manuskrip, walaupun dalam catatan PKPM hanya 30 naskah yang telah diperbaiki kerusakannya. Menurut data daftar Lektur Litbang Jakarta yang dilakuakn oleh Fakhriati melebihi dari 100 naskah jumlahnya. Sampai saat ini belum terdata dengan akurat berapa jumlah naskah koleksinya.
7. Dayah Tgk Syik Awee Geutah, Bireuen; Koleksi di Dayah Awee Geutah dimulai sejak turun temurun dari keluarganya, dan dari masyarakat sekitar hingga berjumlah 52 naskah. Keseluruhannya telah direstorasi, namun belum ada katalog.
8. Koleksi masyarakat di Aceh Besar dan Pidie yang sudah diinventarisir oleh Fakhriati sebanyak 400 naskah pada tahun 2011-2012.

Preservasi naskah-naskah sudah dilakukan sebelum gempa-Tsunami 2004, walaupun sebagian besar secara tradisional dengan media lokal dan sederhana, termasuk tradisi penyalinan ulang seperti di Zawiyah Tanoh Abee. Preservasi itu sendiri pada dasarnya adalah upaya mempertahankan sumberdaya kultural dan intelektual agar dapat digunakan sampai batas waktu yang selama mungkin. Secara filosofis, sebenarnya semua sumberdaya yang mengandung nilai kultur dan intelektual dari masa lampau harus selalu tersimpan dengan baik, sehingga di masa kini dan mendatang kita selalu dapat melacak kembali apa saja yang sudah dikerjakan, dipikirkan, didiskusikan oleh peneliti khususnya, atau masyarakat pada umumnya.

Pada abad ke-21 seiring berkembang teknologi dan keterbukaan akses dengan luar, preservasi naskah-naskah Aceh juga semakin beragam, mulai dari restorasi, digitalisasi hingga publikasi online. Preservasi tidak terbatas pada fisik naskah, melainkan juga teks naskah. Pelestarian isi naskah dapat dilakukan jika fisik naskah memadai dengan digitalisasi, katalogisasi, dan riset, disalin (ditulis ulang), dialih aksarakan, dan diterjemahkan. Dua lembaga asing, antaranya dari Tokyo University

of Foreign Studies (TUFS) Jepang fokus terhadap restorasi dan katalogisasi naskah, dan dari Leipzig University Germany yang fokus pada digitalisasi (scanner) naskah di Museum Negeri Aceh.

Manuskrip Aceh pada Era Modern

Periode ini, manuskrip memiliki dimensi penting yang menjadi tradisi dan budaya untuk dilestarikan manuskrip di tengah-tengah masyarakat Aceh. Para pemilik manuskrip menyimpannya sebagai sesuatu yang berharga dan membawa berkah, meskipun sebagian mereka tidak memahami isinya, bahkan tidak dapat membaca tulisan di dalamnya. Mereka menganggap manuskrip sebagai sesuatu yang dapat memberi makna mistis dan menghubungkan nilai historis dalam kehidupan mereka. Dengan menyimpan manuskrip, baik warisan ataupun bukan, maka kehidupan dapat berkah dan terdindar dari malapetaka bencana, seperti gempa bumi, *wareeh* (penangkal hama). Merujuk kepada kandungan isi manuskrip dan pengetahuan lisan, maka hal tersebut dapat menjauhkan mereka dari bencana tersebut, setidaknya penanganan saat bencana.

Sebelumnya, pemilik naskah dan masyarakat umumnya kurang memberi perhatian terhadap manuskrip, hal tersebut terlihat dari cara mereka memperlakukan lembaran-lembaran manuskrip yang berserakan akan dibakar, atau bundel manuskrip akan disimpan yang kurang layak dan tidak sesuai, seperti dalam karung, peti, loteng rumah atau *meunasah* (balai), atau memindahkangankan kepada pihak lain dengan cara barter. Hal ini (barter) untuk menghindari istilah menjual manuskrip yang dianggap kurang tepat dan mendatangkan hal-hal kurang baik.

Akan tetapi, pada saat ini ada pergeseran paradigma positif di Aceh, seseorang atau masyarakat yang menyimpan dan memiliki manuskrip dianggap sebuah kebanggaan dan memiliki strata lebih dari masyarakat awam. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa kolektor manuskrip yang mendapat apresiasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut juga didorong oleh kepedulian mereka dalam merawat dan memelihara manuskrip itu sendiri daripada menjualnya ke luar negeri. Konsep bisnis (jual-beli) fisik naskah kian berubah menjadi kerjasama program yang memberikan keuntungan kedua belah pihak.

Perubahan tersebut lahir dari kedewasaan pengetahuan masyarakat terhadap warisan budaya leluhur setelah satu dasawarsa pasca bencana alam dan kemanusiaan telah memusnahkan banyak hal. Pemerintah dan masyarakat menyadari nilai budaya “kering” dari sisi filosofis dan historis, sehingga memunculkan semangat untuk pelestarian warisan budaya, seperti hadirnya komunitas peduli terhadap warisan sejarah dan budaya Aceh, termasuk peninggalan artefak dan manuskrip. Sisi lain, peran pemerintah pasca rehab-rekon bencana Aceh dalam mengapresiasi manuskrip (benda cagar budaya) dengan beberapa program yang memberikan informasi dan manfaat masyarakat telah mengubah cara pikir masyarakat dan para kolektor dalam pemeliharaan manuskrip.

Secara politisasi, regulasi pemerintah Aceh diharapkan mampu mendongkrak

kesadaran masyarakat Aceh dalam melestarikan dan merawat manuskrip sebagai salah satu kearifan masyarakat belum terwujud. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa qanun dan aturan kelembagaan daerah Aceh yang belum sinergi dengan sejarah dan catatan-catatan dalam manuskrip, misalnya persoalan Wali Nanggroe (WN) sebagai lembaga tertinggi adat pemerintahan, atau persoalan lambang dan bendera Aceh yang menuai pro-kontra dan dianggap tidak mewakili sejarah Kesultanan Aceh sesuai dengan sumber-sumber primer. Awalnya, kedua klousul tersebut diharapkan mampu menunjukkan citra sejarah dan "aroma" kekhasan Aceh, identitas tersebut dapat ditemui dalam beberapa sumber primer (manuskrip) Aceh periode kesultanan dan dokumen Belanda yang tersimpan di Leiden.

Persoalan lainnya yang terjadi di kelembagaan pemerintahan Aceh terkait konsep implementasi syariat Islam. Penerapan syariat Islam yang dianggap setengah hati untuk merespon otonomi khusus dan konflik vertikal dengan terbitnya Qanun No 10 Tahun 2002. Penerapan tersebut bukan untuk pertama kalinya di Aceh, pada tahun 1968 juga pernah diterbitkan peraturan daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 6/1968 tentang Ketentuan Pokok Pelaksanaan Unsur-unsur Syariat Islam sebagai respon terhadap gerakan Darul Islam (DI/TII) yang dipimpin oleh Tgk M. Daud Beureueh di Aceh antara tahun 1953-1962. Konteks dan konsep penegakan syariat Islam juga pernah mencuat periode kolonial Belanda dalam naskah *Tazkirat ar-Raqidin 'an al-Jihad li-ahl Aceh*, dan periode Kesultanan Aceh dalam beberapa hikayat Aceh. Periode terakhir inilah –khususnya periode Sultan Iskandar Muda– yang diimpikan oleh banyak orang dan disebut-sebut dalam hikayat lisan, walaupun kemudian belum ada konsep yang jelas terhadap penerapan tersebut.

Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, tapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Hal tersebut tergambarkan dalam Naskah *Bustān as-Salāḥīn* yang mengungkapkan topografi periode Kesultanan Aceh Darussalam, yang kini berada di wilayah di Banda Aceh, Mesjid Baitul Musyahadah, Taman Putro Phang, dan Mesjid Baiturrahman. Selain itu, *Bustān as-Salāḥīn* mengungkapkan situs (titik) tempat-tempat bersejarah dan menjadi tur (*tour*) Sultan tempo dulu, termasuk Sultan Iskandar Tsani (w. 1640 M) sebagaimana yang disebut dalam naskah karya Nuruddin ar-Raniry dijadikan sebagai wisata sejarah dan wisata religi.

Upaya melestarikan kultur budaya masyarakat Aceh yang selama ini sudah berlaku, dan beberapa tradisi lokal yang dilakukan secara bersama-sama (bergotong royong) di kampung dapat dihubungkan dengan tradisi leluhurnya, yang selama ini dianggap tidak tertulis (terekam) misalnya, tradisi *peusijuek* (menepung tawari), *peudong rumoh* (membangun rumah), *peugot peuraho* (membuat perahu), *pula padee* (menanam padi), menanam pohon, menebang kayu/hutan, dan sebagainya. Ternyata tradisi tersebut terekam dalam manuskrip Aceh, di mana sikap sosialita manusia dan alam selalu terjalin (berhubungan) dengan Yang Maha Kuasa. Sikap menghargai alam dan menghormati sesama di seluruh aspek mampu menumbuhkan

kerukunan antar sesama, dan dapat memberikan keberkahan dari Sang Khalik.

Bidang wisata sejarah dan wisata religi dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan investor asing. Selama ini, wisata alam dan pemanfaatan sumber alam selalu memunculkan sikap negatif dan kontradiktif dari masyarakat setempat, ataupun dari kelompok tradisional. Oleh karena itu, untuk muatan edukasi terhadap pariwisata tersebut adalah sumber-sumber cagar budaya dapat dijadikan sebagai sentral informasi dan edukasi kepada pengunjung, pengenalan sejarah, tokoh (biografi), tempat, dan sosial budaya merupakan ciri khas yang tidak dimiliki di daerah lainnya. Sebagaimana disebutkan konsep revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat) (Danisworo, 2002). Aceh, pernah berada pada puncaknya sebagai sentral perdagangan dan keagamaan di wilayah Melayu-Nusantara beberapa dekade (15-18 M), dan kemudian mundur di pertengahan abad ke-19 M.

Upaya sosialisasi pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga terhadap pemilik, pewaris dan kolektor pribadi naskah dengan mengikat kerjasama kepemilikan naskah, termasuk pemiliknya untuk mampu memelihara dan merawat naskah. Pada hakikatnya, keberadaan (status) mereka mereka tidak berbeda dengan staf di museum, badan arsip ataupun perpustakaan yang merawat dokumen-dokumen lama. Pemberian beasiswa di perguruan tinggi kepada anak-anaknya di bidang kajian manuskrip (filologi) merupakan salah satu langkah untuk mewarisi ilmu pernaskahan dan kepedulian terhadap manuskrip, karena salah satu faktor stagnansi di Aceh adalah langkanya sumber daya manusia di bidang tersebut. Dengan demikian, secara tidak langsung pemerintah telah menyelamatkan teks dan fisik naskah serta menghentikan jual-beli naskah ke luar negeri dengan alasan perekonomian.

Penutup

Revitalisasi manuskrip merupakan proses, cara, dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan yang dapat disinergikan dengan kontekstual, baik di dalam program instansi pemerintahan, lembaga pendidikan, dayah (pesantren) maupun masyarakat awam (*grassroot*). Di mana upaya itu untuk menumbuhkan nilai filosofi dan histori yang selama ini dianggap budaya dan tradisi "kering" maknanya. Oleh karena itu generasi modern menanggalkan kultur budaya dan tradisi leluhur yang pernah berkembang, dipengaruhi budaya luar terutama pasca rehab-rekon selama satu dasawarsa terakhir. Revitalisasi membangkitkan kembali vitalitas yang pernah "membangkitkan" semangat pengetahuan, kearifan dan keagamaan di Aceh, dengan merujuk kepada sumber-sumber primer yang telah dirancang oleh para

leluhur tanpa menanggalkan konteks zaman modern. Kolaborasi tersebut dapat diraih dengan melibatkan para aktor intelektual, kolektor naskah, tokoh masyarakat dan terutama pemerintah. Manuskrip Aceh menjadi salah satu alternatif (solusi) dalam menjawab problemalitas Aceh saat ini di semua lini dengan mengedepankan sisi islami, humanis, dan kearifan pengetahuan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Achadiati Ikram, *Filologia Nusantara*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1997
- Henri Chambert-Loir. *Panduan Naskah-Naskah Indonesia Sedunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Henri Chambert-Loir & Oman Fathurahman, *Khazanah Naskah; Panduan Koleksi Naskah-naskah Indonesia Sedunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Hermansyah, "Memburu Naskah Kuno; Di Mana Manuskrip Aceh Tersimpan?" <http://www.acehindependent.com/memburu-naskah-kuno-di-mana-manuskrip-aceh-tersimpan.html>. Diakses 20 Juni 2014
- Mohd. Shaghir Abdullah, *Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara*. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah, 1991.
- Mohammad Danisworo & Widjaja Martokusumo (2000), "Revitalisasi Kawasan Kota Sebuah Catatan dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kota". www.urdi.org. Diakses 22 Maret 2014
- Oman Fathurahman & Munawir Holil, *Katalog Naskah Ali Hasjmy Aceh; Catalogue of Aceh Manuscripts: Ali Hasjmy Collection*. Jakarta: YPAH, PPIM UIN Jakarta, Manassa, C-DATS, TUFS, 2007
- Oman Fathurahman, dkk, *Katalog Naskah Dayah Tanoh Abee Aceh Besar*, Jakarta: C-DATS, 2010
- Siti Baroroh Baried, dkk., *Pengantar Teori Filologi*. Yogyakarta: Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas (BPPF) Seksi Filologi Fak. Sastra Universitas Gadjah Mada. 1994.
- T.E. Behrend, [ed.]. *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jil. 4*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-Ecole française d'Extrême-Orient, 1998.
- Wamad Abdullah & M. Dahlan al-Fairusy, *Katalog Manuskrip Perpustakaan Pesantren Tanoh Abee (Buku I)*, Banda Aceh: PDIA, 1980.
- Wan Ali Hj Wan Mamat, "Pengesanan dan Pendokumentasian Manuskrip Melayu di Sumatera, Indonesia", *Jurnal Filologi Melayu*, 2, 1993.
- Zunaimar & M. Dahlan al-Fairusy, *Katalog Manuskrip Perpustakaan Pesantren Tanoh Abee (Buku II)*, Banda Aceh: PDIA, 1993.